

**Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung
*Sustainable Development Goals***

Neneng Hayati

Prodi Manajemen STIE Ekuitas Bandung, Indonesia
neneng.hayati@ekuitas.ac.id

Erwin Yulianto

Prodi Teknik Informatika Universitas Langlangbuana Bandung, Indonesia
eyulianto@unla.ac.id

Syafdinal

Prodi Akuntansi Universitas Widyatama Bandung, Indonesia
syafdinal.mm@widyatama.ac.id

ABSTRAK

Peranan keuangan berkelanjutan dalam Industri Perbankan saat ini yang digagas oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan *World Wildlife Funding* (WWF) pada pembangunan menargetkan pertumbuhan ekonomi sehingga muncul dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari proses pembangunan ekonomi. Hal tersebut mendorong para pemerhati lingkungan, perusahaan serta pemerintahan nasional maupun global mencetuskan harus adanya pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. OJK telah bekerjasama dengan institusi keuangan untuk menyusun *Road Map* Keuangan Berkelanjutan yang bertujuan untuk menjabarkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan berkelanjutan di Indonesia pada periode 2015-2024 bagi industri jasa keuangan. Inisiatif ini juga dibangun untuk berkontribusi sekaligus menangkap peluang bisnis terhadap upaya pembangunan ekonomi Indonesia yang memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim dan berkontribusi langsung pada upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penelurusan data *online*. Berdasarkan *road map* yang telah dibuat oleh OJK, perbankan di Indonesia telah berkomitmen dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) untuk memberikan kredit kepada kreditur yang memiliki sertifikasi sesuai dengan prinsip Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) dan izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di sektor konstruksi hijau, pertanian, infrastruktur hijau, kehutanan, energi terbarukan, industri daur ulang dan efisiensi energi.

Keywords—Pembangunan Berkelanjutan, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Sustainable Development Goals

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, pembangunan yang semata-mata menargetkan pertumbuhan ekonomi dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari proses pembangunan ekonomi mendorong dicetuskannya pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Pembangunan berkelanjutan sebagai paradigma baru dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, telah menarik perhatian dan komitmen banyak lembaga dan negara. Begitu pentingnya isu ini sehingga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bekerjasama dengan berbagai pemerintah, *civil society* dan pelaku ekonomi lainnya telah menyusun kerangka kerja pembangunan berkelanjutan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa permasalahan sosial dan lingkungan hidup yang selama ini belum dimasukkan dalam perhitungan ekonomi menjadi unsur penting yang perlu untuk diperhatikan. Inisiatif global dari beberapa lembaga keuangan di dunia telah dibentuk untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sebagai salah satu otoritas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran untuk mensukseskan komitmen tersebut melalui program keuangan berkelanjutan (*sustainable financing*). Program ini dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak sehingga tercipta dukungan pembiayaan kepada lembaga yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Program keuangan berkelanjutan tidak hanya berupaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan namun juga untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan.

OJK bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait telah menyusun *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan. *Roadmap* ini bertujuan untuk menjabarkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan yang berkelanjutan di Indonesia dalam jangka menengah (2015-2019) dan panjang (2015-2024) bagi industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK serta untuk menentukan dan menyusun tonggak perbaikan terkait keuangan berkelanjutan. *Roadmap* ini akan menjadi acuan bagi OJK dan pelaku industri jasa keuangan serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan terutama pemerintah, pelaku industri maupun lembaga internasional. OJK memastikan terdapat delapan perbankan nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta yang siap menerapkan sistem keuangan berkelanjutan yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, Bank Muamalat, Bank BJB, Bank Arta Graha dan Bank BRI Syariah.

Penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Setelah *roadmap* dicanangkan, Selama dua tahun proyek ini bertujuan untuk meningkatkan *awareness* di industri keuangan. Selama 18 bulan *pilot project*, OJK terus memantau perbaikan kinerja bank-bank tersebut terutama pada aspek manajemen risiko bank pada aspek lingkungan hidup, sosial beserta tata kelolanya, khususnya pada sektor usaha yang berisiko tinggi pada aspek tersebut seperti kelapa sawit. Selain itu, terdapat upaya internal bank dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan bisnis proses bank. Dua tahun berikutnya adalah proses perumusan regulasi, setelah itu penerapan regulasi. Setelah 2024, *green portfolio* diharapkan telah meningkat. Seluruh lembaga keuangan sudah mempunyai *platform* 3P (*People, Planet, Profit*).

Kedelapan bank *'First Movers'* akan memperoleh bimbingan terkait implementasi manajemen risiko lingkungan hidup dan tata kelola. Beberapa keluaran dari proyek rintisan ini termasuk perbaikan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi pada masing-masing bank serta perbaikan kualitas pembiayaan khususnya pada sektor usaha yang memiliki risiko lingkungan hidup dan sosial yang tinggi. Inisiatif ini juga dibangun untuk berkontribusi sekaligus menangkap peluang bisnis terhadap upaya pembangunan ekonomi Indonesia yang memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim dan berkontribusi langsung pada upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan masalah yang akan dikaji dan dianalisis sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan masalah lingkungan global dan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi ?
2. Bagaimana pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah paradigma baru dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ?
3. Bagaimana OJK sebagai pelopor Keuangan Berkelanjutan mengimplementasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) ?
4. Bagaimana langkah-langkah dalam *road map* yang telah diusung OJK ?
5. Bagaimana delapan bank terbesar mengimplementasikan manajemen risiko lingkungan hidup dan tata kelola ?

Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah alur berpikir yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan dari awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Kerangka berpikir dapat disusun dalam bentuk kalimat-kalimat atau digambarkan sebagai sebuah diagram.

Hubungan Masalah Lingkungan Global & Pertumbuhan Serta Pembangunan Ekonomi.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa lapisan ozon kini semakin menipis. Tanpa lapisan ozon, bumi yang kita tinggali ini akan mengalami berbagai dampak negatif yang akan menimpa makhluk hidup, antara lain penyebaran penyakit, cuaca yang tidak menentu, pemanasan global, bahkan hilangnya suatu daerah karena akan mencairnya es yang ada di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Sebelumnya kebanyakan orang menduga masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara dan lainnya. Saat ini orang-orang mulai menyadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. ^{[1] [2]}

Faktor penyebab terjadinya masalah lingkungan adalah teknologi, pertumbuhan penduduk, motif ekonomi dan tata nilai yang berlaku. Barry Commoner (1973) dalam bukunya "the Closing Circle" melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Hasil-hasil teknologi diterapkan dalam sektor industri, pertanian, transportasi dan komunikasi. pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan merupakan penyebab terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup. [3]

Dalam aktifitasnya, kemajuan ekonomi ternyata harus dibayar mahal dengan perusakan lingkungan yang dampaknya telah dirasakan saat ini, antara lain polusi air, udara maupun tanah, bencana banjir dan kekeringan akibat eksploitasi hutan, serta meningkatnya suhu bumi akibat gas rumah kaca sebagaimana Gambar 1 berikut. Kondisi ini jika tidak dilakukan upaya pencegahan maka dampaknya akan dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi juga dinilai belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah.



Gambar 1. Isu Lingkungan Global [4]

Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Sebuah Paradigma Baru Dalam Mengejar Pertumbuhan Ekonomi.

The *World Economic Forum* dalam laporan tahun 2013 menempatkan ekonomi dan lingkungan sebagai risiko utama dunia [5]. Keduanya memiliki keterkaitan di mana diyakini bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan tata kelola industri yang tidak berkelanjutan memberikan dampak negatif pada perekonomian global. *GINI Index (World Bank Estimate)* yang secara umum dijadikan acuan untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan dalam 50 tahun terakhir, memperlihatkan bahwa belum adanya pengaruh signifikan dalam hal perbaikan ekonomi baik pada negara-negara maju maupun sedang berkembang; perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan telah menjadi isu global dan menuntut peran serta seluruh pelaku ekonomi baik individu dan korporasi disamping pemerintah. Keduanya telah menjadi agenda internasional yang masuk ke dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ditetapkan PBB.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs)*. SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society* dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan

kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs yang ditetapkan pada 25 September 2015 meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global sebagaimana Gambar 2 dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. [6]



Gambar 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [7]

Peran OJK Sebagai Pelopor Keuangan Berkelanjutan Dalam Mengimplementasikan Rencana Aksi.

Dewasa ini, lembaga jasa keuangan memiliki peranan yang penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mengarahkan dan mewarnai aktivitas perekonomian. Jika di masa yang lalu parameter kesuksesan lembaga jasa keuangan hanya pada keuntungan yang bersifat finansial, maka untuk saat ini maupun di masa yang akan datang dinilai tidak memadai. Sebagai contoh, krisis keuangan global pada tahun 2008 telah mendorong dilakukan reformasi sektor keuangan dengan menambahkan parameter kesuksesan berupa kontribusi pada stabilitas sistem keuangan terutama pada area penguatan permodalan dan implementasi *Good Corporate Governance*. Bank Indonesia selaku Bank sentral di Indonesia berpandangan bahwa penting untuk mengembangkan perbankan ramah lingkungan. [23]

Dua alasan utama menurut BI yang menilai bahwa hal itu penting [5] :

1. Merespons Undang-undang No 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan dengan pemberian sanksi baik pidana bagi pelakunya hingga pencabutan izin lingkungan, bila hal itu tidak diperhatikan perbankan, maka akan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi.
2. Permasalahan nasional yang hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yaitu ketahanan pangan dan energi. Kedua sektor itu cukup besar pengaruhnya bagi perekonomian. Hal tersebut terlihat dari impor yang terbilang besar, fluktuasi harga komoditas yang berpengaruh kepada inflasi dan tekanan nilai tukar, serta defisit

APBN. Untuk itu, dukungan perbankan untuk membiayai kedua sektor tersebut menjadi sangat penting jika perbankan mendukung pembiayaan ke sektor energi dan ketahanan pangan, hasilnya akan tercipta swasembada energi dan pangan, sekaligus membantu penurunan gas rumah kaca. Selain itu, ruang lingkup *green finance* bisa diperluas ke sektor strategis lainnya, seperti jasa atau transportasi, industri, perumahan, dan produk ekonomi kreatif yang mengedepankan prinsip *green*.

Ekonomi, sosial, dan lingkungan sejatinya adalah tiga bidang yang berbeda karena memiliki karakteristik masing-masing, tetapi bukan mustahil disatukan. OJK yang merupakan badan pengawas lembaga jasa keuangan telah membuktikan bahwa ketiga bidang tersebut dapat disatukan dalam satu konsep yang diberi nama "*Keuangan Berkelanjutan*" atau Keuangan Berkelanjutan sebagaimana Gambar 3. Keuangan Berkelanjutan merupakan dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.



Gambar 3. Keuangan Berkelanjutan [8]

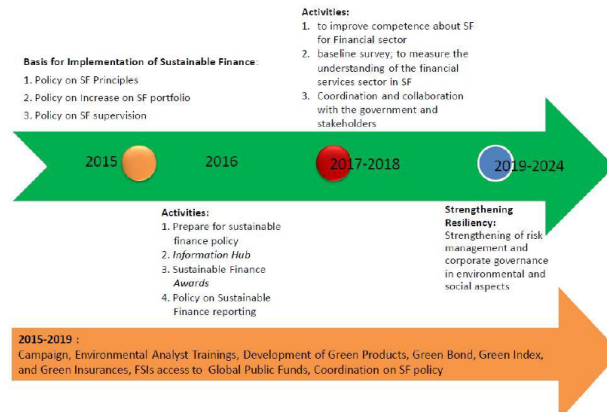
OJK berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuat kebijakan pada akhir tahun 2014 berupa *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan, yang bertujuan memberikan standar baru bagi lembaga jasa keuangan dengan menerapkan prinsip keberlanjutan yaitu harmonisasi aspek 3P (*Profit-People-Planet*) dalam aktivitas bisnis lembaga jasa keuangan. *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan akan menjadi acuan bagi OJK, pelaku industri jasa keuangan dan juga industri keuangan non bank hingga pasar modal yang berada di bawah pengawasan OJK serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah. Peluncuran *Roadmap* ini merupakan kelanjutan dari kerja sama program bertajuk "*Green Banking*" yang pernah terjalin antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Bank Indonesia pada tahun 2010. Seiring dengan lahirnya OJK, program *Green Banking* pun dilimpahkan oleh BI, dan konsepnya diperluas tidak hanya untuk perbankan, tetapi lembaga jasa keuangan.

Misi utama Keuangan Berkelanjutan seperti halnya *Green Banking* ketika pertama kali dicetuskan adalah mengubah paradigma dalam pembangunan nasional dari *Greedy Economy* (Ekonomi Serakah) menjadi *Green Economy* (Ekonomi Hijau). *Greedy Economy* merupakan istilah dimana fokus ekonomi hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi yang dinilai melalui pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP), melakukan

eksploitasi kekayaan alam, dan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada hutang. Sedangkan *Green Economy* merupakan perubahan pandang terhadap pembangunan ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan 3P yakni *people* (sosial), *profit* (ekonomi) dan *planet* (lingkungan).

Roadmap Keuangan Berkelanjutan menjabarkan tiga rencana kerja strategis yakni peningkatan *supply* pendanaan ramah lingkungan hidup; peningkatan permintaan bagi produk keuangan ramah lingkungan hidup dan peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan. [9]

Dalam periode Jangka Menengah (2015-2019) yakni penguatan keuangan berkelanjutan yang difokuskan pada kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan, peningkatan pemahaman, pengetahuan serta kompetensi SDM pelaku industri jasa keuangan, pemberian insentif serta koordinasi dengan instansi terkait & Jangka Panjang (2020-2024) yakni kegiatan yang difokuskan pada integrasi manajemen risiko, tata kelola perusahaan, penilaian tingkat kesehatan bank dan pembangunan sistem informasi terpadu keuangan berkelanjutan. Merujuk pada rincian jangka menengah di atas adalah penekanan tentang perlunya kerangka dasar pengaturan Keuangan Berkelanjutan. Lebih spesifik, tabel Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dalam *Roadmap* menyebutkan perlunya aturan yang menjadi payung kebijakan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana Gambar 10 berikut.



Gambar 4. *Roadmap* Keuangan berkelanjutan [10]

Dalam jangka panjang, penyaluran kepada industri sektor strategis dengan konsep pembiayaan berkelanjutan diharapkan akan mendorong tumbuhnya ekonomi secara berkelanjutan yang pada akhirnya akan memberikan pasar yang lebih besar bagi lembaga jasa keuangan. Pasar yang lebih besar akan tercipta seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan yang kemudian akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan Lembaga Jasa Keuangan pada khususnya dan diharapkan juga dapat mengurangi defisit neraca pembayaran Indonesia. Sebagai upaya untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan dikarenakan adanya kendala kemampuan SDM Indonesia

belum cukup kompeten untuk menilai sektor ekonomi strategis, beberapa inisiatif yang dilakukan oleh OJK bekerja sama dengan pihak-pihak terkait baik nasional maupun internasional antara lain untuk [11] :

1. Meningkatkan kemampuan SDM LJK untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan daya saing LJK menyangkut kemampuan untuk mendanai bisnis-bisnis yang terkait dengan perlindungan lingkungan;
3. Memberi ruang persaingan untuk meningkatkan portofolio kredit / pembiayaan di sektor ekonomi prioritas yang mendukung kegiatan perlindungan lingkungan; dan
4. Meningkatkan *awareness* dan perubahan paradigma (*mindset*) dalam pembangunan nasional dari *greedy economy* menuju *green economy*.

Langkah-Langkah Pelaksanaan Road Map Yang Telah Diusung OJK.

Lembaga Jasa Keuangan memiliki pengaruh atas perilaku operasional dari para pelaku bisnis. OJK menyadari peran signifikan dari lembaga jasa keuangan sehingga merancang *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan bertujuan untuk mendorong lembaga jasa keuangan mengimplementasikan praktik-praktik keuangan yang lebih ramah lingkungan dengan 'menghijaukan' basis pelanggannya dan mengutamakan transaksi keuangan untuk proyek bisnis yang ramah lingkungan. Prinsip baru ini akan membantu Indonesia untuk mencapai dan menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan kelestarian. Hal tersebut membuat Keuangan berkelanjutan dapat menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Lembaga jasa keuangan wajib mematuhi prinsip keuangan berkelanjutan dan menerapkan etika bisnis sehingga dapat membuat hal positif bagi lingkungan dan meningkatkan *brand value* sekaligus mengecilkan potensi risiko reputasi. Risiko reputasi dan risiko kredit biasanya timbul dari investasi proyek yang mengancam kelestarian lingkungan. Lembaga jasa keuangan mengutamakan investasi untuk aktivitas bisnis yang ramah lingkungan dapat membantu lembaga jasa keuangan mengatasi risiko perusahaan dan memastikan keberlanjutan perusahaan.

Delapan bank dengan aset terbesar berkomitmen menjadi perintis untuk perbankan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut dituangkan melalui Proyek Percontohan (*Pilot Project*) bekerjasama dengan OJK dan WWF-Indonesia yang bertajuk "Langkah Pertama Untuk Menjadi Bank Yang Berkelanjutan" [11][12]. Kedelapan bank tersebut adalah Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Bank Muamalat, BRI Syariah, bank **bjb** dan Bank Artha Graha Internasional. Komitmen ini merupakan langkah besar yang diambil para bank setelah kurang dari setahun diluncurkannya *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan oleh OJK pada tanggal 5 Desember 2014.

Proyek percontohan ini bertujuan untuk mendukung penyiapan kompetensi bank menyangkut sasaran dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia periode 2014-2019. Kompetensi yang disasar secara khusus adalah kemampuan organisasi dalam mengelola aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) dalam keputusan bisnisnya. Juga untuk meningkatkan porsi pembiayaan ke kegiatan bisnis yang dilakukan secara berkelanjutan. Langkah besar yang diambil oleh delapan bank yang mewakili 46% aset

perbankan nasional ini diharapkan mendorong bank dan Lembaga jasa keuangan lainnya mengikuti jejak mereka untuk mulai menerapkan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas komitmen dalam mengelola dan menerapkan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola, bank turut mengambil peran untuk meningkatkan profil kinerja perusahaan di Indonesia.

OJK bersama WWF akan terus mendampingi kedelapan bank ini untuk mulai menerapkan keuangan berkelanjutan secara sistematis. Sebagai bagian dari proyek percontohan, bank peserta akan mendapatkan serangkaian pendampingan teknis meliputi identifikasi profil risiko LST bank dari berbagai sektor. Proses ini juga sekaligus memanfaatkan peluang-peluang yang teridentifikasi melalui diskusi terbatas dengan para ahli perbankan, serta pelaku industri. Peran aktif perbankan, OJK dan WWF Indonesia ini dilakukan dalam rangka mendorong integrasi LST secara bertahap hingga akhirnya praktik bank dan lembaga jasa keuangan lainnya di Indonesia dapat mencapai standar kinerja terbaik untuk aspek LST.

Metode penelitian

Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlaku pada saat ini yang di jadikan objek penelitian, kemudian data atau informasi di analisis sehingga di peroleh suatu pemecahan masalah. Seperti dikatakan David Williams (1995) dalam buku Lexy Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. [21].

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode penelusuran data *online*. Metode penelusuran data *online* yaitu tata cara melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online*, sehingga memungkinkan peneliti memanfaatkan data *online* berupa informasi secepat atau semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. [22]

Result & discussion

Keuangan Berkelanjutan Bank Mandiri

Bank Mandiri merupakan salah satu dari delapan Bank yang membentuk inisiatif keuangan berkelanjutan Indonesia yaitu "*First Movers on Sustainable Banking*" yang diinisiasikan oleh OJK sejak tahun 2015. Bank Mandiri mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam berbagai kebijakan dan program perkreditan, khususnya standar prosedur kredit segmen korporasi dan komersial. Bank Mandiri telah bersiap untuk melangkah menuju bank yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan melalui pembuatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

Bank Mandiri telah menyusun RAKB untuk jangka menengah dan jangka panjang sejak menjadi salah satu bank inisiator keuangan berkelanjutan di Indonesia. Komitmen

Bank Mandiri dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan diwujudkan melalui penyaluran kredit ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan kerja sama yang dilakukan bersama *Agence Francaise de Development* (AFD) dalam proyek yang bernilai US\$ 100 juta untuk membiayai proyek *hydropower*, biogas dan *combined-cycle powerplant*.

Komitmen Bank Mandiri dalam mengembangkan keuangan berkelanjutan adalah dengan menetapkan beberapa sektor prioritas dalam 5 tahun ke depan dalam implementasi RAKB. Salah satunya memprioritaskan pembiayaan kepada sektor kelapa sawit dan minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO). Saat ini sudah lebih dari 50% total debitur di sektor tersebut yang telah memiliki sertifikasi RSPO [*Roundtable on Sustainable Palm Oil*] dan ISPO [*Indonesia Sustainable Palm Oil*]. Selain itu, penyaluran kredit ramah lingkungan lain adalah pada sektor perkebunan yang proporsinya sekitar 13.91% dari total kredit Bank Mandiri yang berjumlah 729,55 triliun rupiah pada tahun 2017. Penyaluran kredit di bidang perkebunan ini diklasifikasikan dalam beberapa komoditas yaitu kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi dan komoditas agro lainnya [13].

Saat ini Bank Mandiri secara terus-menerus melakukan edukasi dan mendorong agar praktik bisnis debitur lebih sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. Di samping itu juga mendorong bersama pelaku usaha lain dapat membangun industri yang ramah lingkungan. Di tahun 2018, Bank Mandiri juga telah menyalurkan kredit senilai Rp. 2 triliun untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) yang terbagi ke dalam tahapan sesuai dengan perkembangan proyek dan kebutuhan debitur.

Keuangan Berkelanjutan Bank Negara Indonesia (BNI)

BNI juga merupakan salah satu dari delapan Bank yang membentuk inisiatif keuangan berkelanjutan Indonesia yaitu "*First Movers on Sustainable Banking*". BNI telah menyusun RAKB 2019 yang akan menjadi dasar dan pedoman bagi implementasi Keuangan Berkelanjutan. Keuangan Berkelanjutan di BNI diimplementasikan dengan merintis beberapa program antara lain Program Ayo Menabung Dengan Sampah [14].

BNI juga melakukan Pengembangan Kapasitas Internal dalam bentuk pelatihan - pelatihan dan program edukasi masyarakat, hingga memperkuat SOP perkreditan yang mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial. Sejalan dengan Kriteria Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) yang diatur dalam Petunjuk Teknis POJK Nomor 51/2017. BNI juga mengikuti kriteria Debitur yang mendapatkan pembiayaan apabila di dalam proses bisnisnya mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam, melaksanakan mitigasi dan adaptasi lingkungan menghadapi dampak perubahan iklim, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kategori kegiatan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan yaitu Energi Terbarukan; Efisiensi Energi; Pencegahan dan Pengendalian Polusi; Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan; Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air; Transportasi Ramah Lingkungan; Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan; Adaptasi Perubahan Iklim. BNI konsisten menyalurkan pembiayaan pada sektor-sektor yang berwawasan lingkungan antara lain Sektor Perkebunan seperti Perkebunan Sawit yang tersertifikasi *Indonesia Sustainable*

Palm Oil (ISPO) atau *Round Table Sustainable Palm Oil* (RSPO) serta pembiayaan energi terbarukan seperti *Micro Hydro* dan menyalurkan pembiayaan hanya pada perusahaan yang dinyatakan dinilai layak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu mendapat penilaian Emas, Hijau, Biru.

Komitmen BNI dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan diwujudkan melalui penerapan pembiayaan sektor ramah lingkungan yang sudah aktif diberlakukan oleh BNI sejak tahun 2007. Pada tahun 2017, BNI telah menyalurkan pembiayaan hijau segmen korporasi sebesar 57,65 miliar rupiah yaitu 18,31% dari total kredit. Selain itu BNI juga telah memiliki prosedur pemberian kredit korporasi yang mengharuskan debitur untuk memiliki izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan penilaian standar lingkungan PROPER yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sesuai amanat POJK 51/2017, Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) III dan IV mulai tahun ini mesti menerapkan prinsip penerapan keuangan berkelanjutan.

Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) yang diatur dalam Petunjuk Teknis POJK menjadi acuan dalam penyempurnaan SOP terkait penyaluran kredit yang berwawasan lingkungan. BNI Berorientasi menyalurkan pembiayaan hanya pada Kegiatan Usaha yang memenuhi syarat sebagai kegiatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam beberapa tahun ke belakang, BNI pun telah konsisten menerapkan keuangan berkelanjutan ke sektor hijau, alias *green financing*. Sektor-sektor yang disasar adalah pembangunan pembangkit listrik, sektor perkebunan sawit, di mana debitur mesti punya sertifikat ISPO atau RSPO. Adapula pembiayaan terkait energi terbarukan seperti *micro hydro*. Selain itu, debitur juga diwajibkan punya sertifikat proper yang laik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyaluran Kredit Pembiayaan Hijau yang disalurkan BNI pada 2018 mencapai Rp 83,38 triliun atau sekitar 23,19% dari total kredit BNI. Komposisi tersebut terus meningkat dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 18,31% dari total Kredit Tahun 2017.

Keuangan Berkelanjutan Bank Rakyat Indonesia (BRI)

BRI meyakini pelaksanaan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dapat meningkatkan daya tahan dan daya saing perusahaan dalam menghadapi tantangan dunia perbankan yang semakin dinamis. Untuk itu BRI senantiasa adaptif dan proaktif memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan produk dan/atau jasa keuangan sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan. BRI mulai menjalankan proyek-proyek hijau seperti pengembangan *green IT* dan pembangunan kantor dengan konsep *green building*.

BRI sudah mengirimkan RAKB kepada OJK pada bulan November 2018 yang meliputi pengembangan produk, kapasitas SDM dan peningkatan portofolio. untuk memaksimalkan implementasi tersebut, bank BRI telah mematok kriteria bagi debitur dalam aksi keuangan berkelanjutan.

Pertama, debitur tak termasuk dalam daftar hitam yang diterbitkan pemerintah maupun asosiasi perusahaan. Kedua, debitur juga mesti punya perizinan lengkap misalnya dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan peringkat proper yang

dikeluarkan pemerintah. Ketiga, khusus untuk debitur perusahaan sawit harus memegang sertifikat ISPO atau RSPO.

Komitmen BRI dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan diwujudkan melalui penerapan pembiayaan sektor ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengolahan limbah, pertanian dan perikanan berkelanjutan, bangunan hijau, dan pariwisata berkelanjutan. Saat ini BRI sedang melakukan pemetaan pembiayaan tersebut untuk dikategorikan sebagai pembiayaan berkelanjutan. Di samping itu, BRI mendukung perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Kebijakan ini mencakup prinsip pengelolaan industri kelapa sawit dan dibentuk agar debitur mempertimbangkan pengelolaan isu lingkungan. Pada tahun 2017, BRI telah menyalurkan pinjaman kepada perusahaan kelapa sawit bersertifikat RSPO / ISPO sebesar 23,24 miliar kepada 21 perusahaan. selain itu, BRI juga melakukan penilaian sektor usaha melalui instrumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) [15].

Pada tahun 2019, untuk meningkatkan nilai yang disalurkan, BRI melakukan beberapa program khusus seperti sosialisasi ke Internal BRI dan Nasabah untuk meningkatkan *awareness* sehingga dapat segera memenuhi kriteria atau sertifikasi yang sudah ditentukan. BRI mematok target kredit berkelanjutan bisa tumbuh 12% hingga 14%. Selaras dengan target pertumbuhan kredit BRI itu Sementara pada 2018 lalu, dari total kredit Rp 804 triliun (*bank only*), 44% atau sekitar Rp 353 triliun masuk sudah sesuai prinsip keuangan berkelanjutan. Sementara dari sektor korporat, menghasilkan kredit senilai Rp 197,9 triliun atau setara dengan 37% dari total kredit yang disalurkan telah berprinsip pada keuangan berkelanjutan.

Keuangan Berkelanjutan Bank Central Asia (BCA)

BCA berpandangan bahwa perbankan perlu mengadaptasikan diri dengan prinsip keuangan berkelanjutan karena manfaat bisnisnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Konsepnya memasukkan faktor Lingkungan, Sosial dan Tata kelola (LST) dalam pembuatan proposal kredit dan menganalisa *credit risk rating* untuk menentukan kelayakan kredit debitur. Pendanaan kredit juga diprioritaskan untuk mengembangkan produk dan layanan ramah lingkungan yang sesuai standar internasional. Selain itu, BCA memahami adanya kesadaran global dan nasional yang makin menguat terkait prinsip pembiayaan yang berkelanjutan, yang tidak saja mengedepankan profit tetapi juga memperhatikan faktor penting dari prinsip penghormatan terhadap kehidupan.

BCA mendukung program pembiayaan berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak saja menyejahterahkan secara ekonomi tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola sosial dan lingkungan secara terintegrasi. BCA berkomitmen menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata kelola (LST) dalam keseharian operasional bank dengan terlibat dalam *pilot project 'First Movers on Sustainable Banking'* yang digagas oleh OJK sejak tahun 2015. Tidak hanya pengembangan bisnis yang ramah lingkungan, BCA juga mendorong seluruh karyawan dan manajemen BCA menerapkan prinsip *Reuse, Reduce, dan Recycle* dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Sejumlah inisiatif rutin dijalankan diantaranya mematikan lampu dan monitor komputer saat jam istirahat, gunakan *tumbler* saat *meeting* serta budayakan *printing* dua sisi untuk segala macam

dokumen. Hal tersebut juga merupakan bentuk dukungan bank BCA terhadap gerakan nasional *Go Green* [16].

BCA mendukung penyaluran kredit di sejumlah sektor seperti produk energi terbarukan, efisiensi energi, dan pertanian organik yang sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan kelayakan kredit bisnis terkait. Komitmen BCA terhadap Keuangan Berkelanjutan diwujudkan dengan meningkatkan porsi pembiayaan di sejumlah sektor seperti produk ramah lingkungan, konservasi energi, dan pertanian organik. Dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, BCA mendukung penyaluran kredit di sejumlah sektor seperti produk energi terbarukan, efisiensi energi, dan pertanian organik sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan kelayakan kredit bisnis terkait. Namun demikian keseluruhan proses pemberian kredit di BCA selalu dan senantiasa menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

Komitmen BCA dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) diwujudkan dengan meningkatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan setiap tahunnya. BCA memprioritaskan pembiayaan sektor-sektor yang berhubungan dengan pertanian berkelanjutan, infrastruktur hijau, kehutanan berkelanjutan, energi terbarukan, industri daur ulang, efisiensi energi, dan gedung hijau. Selain itu, komitmen BCA dalam mendukung program pembangunan pemerintah seperti inklusi keuangan diwujudkan dengan menyalurkan porsi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 103,55 miliar per Desember 2017.

Dalam setiap keputusan melakukan pembiayaan, BCA selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip keuangan berkelanjutan. BCA aktif mendukung pembiayaan dari proyek-proyek berkelanjutan. Sampai tahun 2018, sekitar Rp 7,56 triliun telah dikucurkan BCA untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan. BCA senantiasa terbuka terhadap kemungkinan untuk mendukung pembiayaan berbagai proyek berkelanjutan demi menjamin pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Keuangan Berkelanjutan Bank Muamalat

Bank Muamalat menyadari bahwa pencapaian tujuan kinerja mereka secara berkesinambungan harus selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan; khususnya dalam menyelaraskan tiga aspek keberlanjutan yang umumnya disebut dengan *triple bottom line*, yang terdiri dari *profit* (ekonomi), *people* (sosial), dan *planet* (lingkungan) secara bersamaan dan berimbang.

Untuk itu, Bank Muamalat telah berkomitmen untuk senantiasa berkarya memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia guna mendukung terciptanya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sementara orientasi investasi yang inovatif ditranslasikan melalui kebijakan yang selalu memperhatikan aspek-aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) dalam setiap keputusan terutama terkait dengan keputusan pembiayaan. Bank Muamalat meyakini bahwa upaya-upaya tersebut akan turut meningkatkan kesadaran nasabah dalam menerapkan maupun

mempertahankan pola usaha yang berkelanjutan. Bank Muamalat menyadari bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memiliki dampak langsung kepada lingkungan maupun sosial ekonomi seluruh umat yang beraktivitas di sekitar lokasi usaha Bank [17].

Bank Muamalat Indonesia memiliki kebijakan untuk tidak membiayai nasabah yang secara nyata membahayakan lingkungan. Dalam rangka melestarikan lingkungan, Bank Muamalat Indonesia berupaya mewujudkan program *green banking*, sebagai bentuk nyata penerapan *green economy* dalam dunia perbankan syariah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu penerapan intinya yaitu melalui penyaluran pembiayaan ramah lingkungan dan kegiatan operasional ramah lingkungan (*green campaign*).

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen menjadi salah satu bank pelopor dalam penerapan sektor keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari pencapaian *Sustainable Development Goals*. Untuk mendukung hal tersebut, Bank Muamalat memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang bertanggung jawab terhadap aspek lingkungan dan sosial. Melalui komitmen tersebut, Bank Muamalat mengambil sikap untuk membiayai perusahaan apapun yang memiliki mitigasi risiko terhadap dampak lingkungan dan sosial, termasuk bagi perusahaan di sektor kelapa sawit atau pertambangan. Sampai saat ini sektor yang banyak diberikan pembiayaan adalah *Micro Hydro*, sejalan dengan pemerintah terhadap kebutuhan listrik secara umum melalui energi terbarukan.

Bank Muamalat telah mengembangkan keuangan berkelanjutan untuk pembiayaan di sektor komoditas yakni kelapa sawit. Hal tersebut diwujudkan dengan melakukan kerjasama dengan industri kelapa sawit yang terbukti berkontribusi terhadap lingkungan, guna membantu 10.000 petani plasma selama dua tahun ke depan. Bank Muamalat juga akan mengembangkan keuangan berkelanjutan, dimana perusahaan kelapa sawit yang bekerja sama harus sudah memiliki sertifikat *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). RSPO sendiri merupakan sebuah asosiasi yang mengatur tentang standard internasional dalam mengolah perkebunan kelapa sawit secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Keuangan Berkelanjutan BRI Syariah

Pada saat kondisi perekonomian masih penuh dengan dinamika, BRI Syariah berupaya untuk memperkuat landasan keuangan keberlanjutan. BRI Syariah memulainya dengan inisiatif *green banking* pada tahun 2016 sebagai wujud komitmen untuk mengaktualisasikan keuangan berkelanjutan. Komitmen ini tertuang dalam kebijakan perusahaan yang mengintegrasikan kinerja ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan.

BRI Syariah berprinsip untuk mengelola dana masyarakat untuk membiayai kembali usaha masyarakat dengan memperhatikan keselarasan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. BRI Syariah menerapkan pendekatan *green banking* yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial dalam kebijakan dan proses pembiayaan untuk mendukung usaha yang berkelanjutan. Bagi BRI Syariah, keberlanjutan adalah mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dalam kebijakan operasional perusahaan yang selaras dengan tata kelola perusahaan. Dasar keberlanjutan ini sejalan

dengan lima aspek (5Ps) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang saling berhubungan, yaitu: *people* (manusia), *planet* (bumi), *prosperity* (kemakmuran), *peace* (perdamaian) dan *partnership* (kemitraan).

Dalam upaya aktualisasi keuangan berkelanjutan, BRI Syariah berinisiatif membentuk Satuan Kerja Pendampingan Implementasi keuangan keberlanjutan. Satuan kerja ini membantu menentukan arah strategis dan target BRI Syariah dalam meningkatkan integrasi keuangan berkelanjutan serta sasaran pelaksanaan dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan dan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) di BRI Syariah.

BRI Syariah mengimplementasikan praktik inisiatif keuangan berkelanjutan melalui upaya:

1. Menerapkan kebijakan pembiayaan *green banking*;
2. Penguatan Teknologi Informasi (TI);
3. Mengelola sumber daya insani dan melaksanakan tata kelola berkelanjutan.

Inisiatif ini bertujuan mendukung pencapaian sasaran peta jalan Keuangan Berkelanjutan untuk periode 2015-2019 sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan OJK (POJK). Sejak tahun 2016, BRI Syariah fokus menerapkan strategi segmentasi dan komposisi pembiayaan *green banking* untuk mendukung program pemerintah, seperti pada segmen kelistrikan dan UKM. Pada segmen kelistrikan, pembiayaan *green banking* telah disalurkan kepada delapan nasabah untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH). Total plafon yang disetujui sebesar Rp. 233 miliar, telah direalisasikan sebesar Rp. 134 miliar dengan baki debit pada akhir tahun sebesar Rp. 59 miliar [18].

Selain itu, komitmen menuju Keuangan Berkelanjutan juga diwujudkan melalui segmen bisnis mikro. Rata-rata pertumbuhan Mikro pertahun selama 6 (enam) tahun terakhir sebesar Rp.583 miliar. BRI Syariah di tahun 2018 telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Mikro sebesar Rp. 449,6 miliar sementara KUR Kecil sebesar Rp. 248,9 miliar. Pembiayaan mikro yang disalurkan meningkat tiap tahunnya dan menargetkan peningkatan pembiayaan usaha mikro secara keseluruhan hingga sebesar Rp 3 triliun di tahun 2019 ini.

Keuangan Berkelanjutan bank bjb

Sebagai salah satu dari delapan lembaga keuangan yang berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam hal pengembangan dan implementasi keuangan berkelanjutan "*Indonesia First Movers On Sustainable Banking*", bank **bjb** memperoleh penghargaan dari OJK yaitu "Keuangan Berkelanjutan Award 2016" untuk kategori BUKU III. Penghargaan ini diberikan kepada bank **bjb** karena telah memberikan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan.

bank **bjb** merupakan bank pembangunan daerah pertama yang mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Juli 2010. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini dipergunakan oleh bank **bjb** untuk penguatan modal perusahaan dalam rangka mendukung ekspansi kredit, terutama sektor UMKM, perluasan jaringan, dan pengembangan teknologi informasi.

Pada tahun 2016 bank **bjb** memiliki kebijakan strategis yaitu meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit yang berkualitas melalui diversifikasi portofolio pembiayaan selain *captive market* pembiayaan proyek-proyek pemerintah dan pembiayaan sektor konsumtif. Adapun kebijakan tersebut akan direalisasikan dengan rencana ekspansi kredit di sektor industri perkebunan kelapa sawit, energi listrik, perkapalan dan migas [19].

Keberlanjutan usaha bank tidak hanya diukur dari pertumbuhan kinerja finansial saja, tetapi juga kemampuan dalam memahami permasalahan sosial dan lingkungan di komunitas sekitar wilayah operasional bank serta sejauh mana kepedulian dan keterlibatan bank dalam pembangunan masyarakat secara utuh yang dilakukan diantaranya melalui :

1. Penetapan kebijakan persyaratan AMDAL untuk analisis kredit.
2. Efisiensi penggunaan material dan konsumsi energi.
3. Melaksanakan program CSR yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan melestarikan lingkungan.
4. Inovasi produk dan jasa perbankan yang ditujukan untuk segmen anak-anak sebagai bentuk edukasi bagaimana anak-anak memiliki rekening tabungan dan mengelolanya sendiri. Yaitu dengan meluncurkan produk tabungan baru yaitu "Tandamata My First"
5. Memberikan kemudahan akses kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui kredit mikro dan Kredit Cinta Rakyat (KCR).
6. Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi melalui pemanfaatan mobil edukasi literasi keuangan (SiMoIek).
7. Meluncurkan program *Mini Banking* yang ditujukan bagi siswa SD dan SMP.
8. Program-program CSR sektor pendidikan ditujukan pada pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, sekolah kejuruan serta pendidikan anak luar biasa.
9. Kegiatan CSR bidang kesehatan.

Melalui program-program tersebut, bank **bjb** menunjukkan komitmen untuk terus bersinergi dan meningkatkan performanya melalui inovasi produk dan layanan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat tanpa mengurangi kepedulian serta perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Keuangan Berkelanjutan Bank Artha Graha Internasional

Bank Artha Graha Internasional adalah lembaga jasa keuangan di Indonesia yang merupakan salah satu dari delapan Bank yang berkomitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Sejalan dengan visi dan misi Bank Artha Graha Internasional menjadi *good corporate citizen* yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, Bank Artha Graha Internasional terus berupaya untuk berkontribusi positif melalui konsep *triple bottom line* : *planet*, *profit* dan *people*. Implementasi dari keuangan berkelanjutan ini tidak hanya merupakan usaha Bank, tetapi juga merupakan hasil kerja sama berkelanjutan dengan nasabah. Sebagai implementasi dari *First Movers*, sampai dengan akhir tahun 2018, telah

diterapkan praktik tata kelola yang baik dengan memperhitungkan aspek sosial lingkungan secara konsisten dalam kegiatan usaha yang dijalankan Bank [20].

Dalam komitmennya, Bank Artha Graha Internasional telah melakukan pengembangan kapasitas kompetensi internal dalam kemampuan organisasi, manajemen risiko dan sumber daya yang sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dalam tata kelola dan keputusan bisnis Bank. Beberapa bentuk pengembangan tersebut adalah penerapan prinsip pembiayaan berkelanjutan yang tercermin dengan diterbitkannya kebijakan pembiayaan berkelanjutan dan kebijakan pembiayaan kelapa sawit yang ramah lingkungan, serta penyesuaian checklist sector keuangan yang harus dihindari pada pembiayaan kredit komersial dan korporasi (*exclusion list*) sebagai upaya penguatan penerapan manajemen risiko. Kebijakan berkelanjutan ini berada langsung di bawah pengawasan dan tanggung jawab dari Direksi.

Alokasi pengembangan SDM disusun untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam memahami jenis produk layanan, khususnya pembiayaan berkelanjutan. Upaya pengembangan SDM telah dilakukan melalui *capacity building*, yakni dengan mengikutsertakan SDM dalam berbagai macam pelatihan, *workshop*, *training*, sosialisasi, ataupun seminar terkait keuangan berkelanjutan.

Pengembangan kompetensi juga dilakukan dengan memasukkan aspek keuangan berkelanjutan ke dalam *Key Performance Indicator* (KPI) serta mengembangkan Tim *Task Force*, yang terdiri dari Direktorat Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, *Corporate Planning*, Bisnis dan Kredit, dimana dalam implementasinya terdapat alur proses penilaian aspek lingkungan social dan tata kelola. Beberapa hal yang telah dilakukan adalah mewujudkan keuangan yang inklusif melalui keagenan Laku Pandai, pembiayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui KUR, pemberdayaan ekonomi pedesaan yang bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya, serta pembiayaan infrastruktur hijau dengan acuan sertifikasi berkelanjutan berbagai sektor.

Secara intern, Bank juga mendorong seluruh karyawan dan manajemen menerapkan prinsip *go-green* dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Sejumlah inisiatif rutin dijalankan, diantaranya transaksi paperless dengan menggunakan *scanning document*, email, *Electronic Data Capture (EDC)*, penggunaan kartu ATM, *mobile banking* dan *internet banking*, penghematan listrik dengan mematikan lampu ruang rapat ataupun komputer saat tidak digunakan, tidak menggunakan gelas plastik saat rapat, penghematan kertas dengan mengoptimalkan kertas bekas, penghematan biaya telepon dengan mengefektifkan penggunaan *Voice Over Internet Protocol (VoIP)* serta berbagai inisiatif rutin lainnya untuk mendukung budaya *go-green*.

Simpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Maraknya isu penurunan kualitas lingkungan hidup, isu kesenjangan sosial yang makin melebar dan isu perubahan iklim dengan segala implikasinya. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari proses pembangunan ekonomi mendorong para pemerhati lingkungan, perusahaan serta pemerintahan global maupun nasional mencetuskan harus adanya pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.
2. Pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah paradigma baru dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan antara kepentingan untuk memperoleh profit tidak berarti dapat memberikan legitimasi untuk menurunkan perhatian dan komitmen menjaga lingkungan dan kehidupan sosial yang lebih baik. Inisiatif global dari beberapa lembaga keuangan di dunia telah dibentuk untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Lembaga jasa keuangan memiliki peranan yang penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi namun sekaligus mengarahkan aktifitas berekonomi. OJK telah bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait telah menyusun *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* yang bertujuan untuk menjabarkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan yang berkelanjutan di Indonesia dalam jangka menengah (2015-2019) dan panjang (2015-2024) bagi industri jasa keuangan.
4. Delapan bank nasional yang mewakili 46 persen aset perbankan Indonesia bersama WWF Indonesia membentuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI). Delapan institusi keuangan tersebut adalah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, Bank Muamalat, Bank **BJB**, Bank Arta Graha, dan Bank BRI Syariah.
5. kedelapan bank '*First Movers*' akan memperoleh bimbingan terkait implementasi manajemen risiko lingkungan hidup dan tata kelola. Beberapa keluaran dari proyek rintisan ini termasuk perbaikan kebijakan dan *Standard Operating Procedure* pada masing-masing bank serta perbaikan kualitas pembiayaan khususnya pada sektor usaha yang memiliki risiko lingkungan hidup dan sosial yang tinggi. Inisiatif ini juga dibangun untuk berkontribusi sekaligus menangkap peluang bisnis terhadap upaya pembangunan ekonomi Indonesia yang memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim dan berkontribusi langsung pada upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

References

- [1] Wikipedia, 2020, Masalah Lingkungan, https://id.wikipedia.org/wiki/Masalah_lingkungan, diakses pada 23 Februari 2020
- [2] HPLI, 2020, Isu Lingkungan, <http://www.hpli.org/isu.php>, diakses pada 13 April 2020
- [3] Scott, Robert L., 1973, *The Closing Circle: A Review of Barry Commoner 's Book*, Justitia, Vol. 1, No. 1, pp. 81-90
- [4] Naturetalkies, 2020, Major Global Environmental Issues Faced by the Planet Earth, <https://www.naturetalkies.com/major-global-environmental-issues-faced-by-the-planet-earth>, diakses pada 23 Februari 2020
- [5] SWA, 2020, Alasan Utama BI Kembangkan Green Banking, <https://swa.co.id/swa/trends/management/alasan-utama-bi-kembangkan-green-banking>, diakses pada 23 Februari 2020
- [6] OJK, 2020, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-internasional/Pages/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan.aspx>, diakses pada 23 Februari 2020
- [7] SGD, 2020, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan <https://www.sdg2030indonesia.org/news>, diakses pada 23 Februari 2020
- [8] TSI, 2020, Keuangan Berkelanjutan, <https://www.tsi-kompakt.de/2018/07/green-finance-eu-regulierung-das-proiekt-nachhaltige-finanzierung>, diakses pada 23 Februari 2020
- [9] OJK, 2020, Roadmap Keuangan Berkelanjutan <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/panduan/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan.aspx>, diakses pada 13 April 2020
- [10] OJK, 2020, Roadmap Keuangan Berkelanjutan <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/tentang/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan.aspx>, diakses pada 13 April 2020
- [11] WWF, 2020, Keuangan Berkelanjutan, https://www.wwf.or.id/program/inisiatif/mti_indonesia/keuangan_berkelanjutan, diakses pada 23 Februari 2020
- [12] OJK, 2020, 8 Bank Ini Berkomitmen Terapkan Keuangan Berkelanjutan, <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/berita/berita-nasional/Pages/8-Bank-Ini-Berkomitmen-Terapkan-Keuangan-Berkelanjutan.aspx>, diakses pada 23 Februari 2020
- [13] Finansial, 2020, Terapkan Sustainable Finance, Bank Mandiri Fokus ke Kelapa Sawit, <https://finansial.bisnis.com/read/20190227/90/893971/terapkan-sustainable-finance-bank-mandiri-fokus-ke-kelapa-sawit>, diakses pada 23

Februari 2020

- [14] BNI, 2020, Optimalisasi Potensi, Adaptasi Perubahan, https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/BNI_SR2018_ENG.pdf, diakses pada 23 Februari 2020
- [15] BRI, 2020, *Sustainability Report*, https://bri.co.id/documents/20123/56786/BRI_2019_Annual_Sustainability_Bond_Report_DRAFT_vFF_compressed.pdf, diakses pada 23 Februari 2020
- [16] BCA, 2020, Implementing Sustainable Financial Principles, BCA Prioritizes Eco-Friendly Sector Funding, <https://www.bca.co.id/en/Tentang-BCA/Korporasi/Siaran-Pers/2017/07/14/03/04/terapkan-prinsip-keuangan-berkelanjutan-bca-prioritaskan-pembiayaan-sektor-ramah-lingkungan>, diakses pada 23 Februari 2020
- [17] Muamalat, 2020, *Sustainability Report*, <https://www.bankmuamalat.co.id/en/investor-relations/sustainability-report>, diakses pada 23 Februari 2020
- [18] Kontan, 2020, Tahun ini, BRI bidik pertumbuhan sustainable finance 14%, <https://keuangan.kontan.co.id/news/tahun-ini-bri-bidik-pertumbuhan-sustainable-finance-14>, diakses pada 23 Februari 2020
- [19] Finansial, 2020, Bank BJB Siapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, <https://finansial.bisnis.com/read/20190221/90/891783/bank--siapkan-rencana-aksi-keuangan-berkelanjutan->, diakses pada 23 Februari 2020
- [20] Artha Graha, 2020, Komitmen Teguh, Bersatu Hati, Bersama Membangun Serta Meraih Keberhasilan Untuk Semua, <http://www.arthagraha.com/storage/app/media/ar-2017-bank-artha-graha-e-reporting23-05-2018-2.pdf>, diakses pada 23 Februari 2020
- [21] Moleong, Lexy., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- [22] Bungin, Burhan., 2013, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasara Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- [23] Supriyatna, Agus; Yulianto, Erwin; Hamdani, Nizar Alam; Maulani, Galih Abdul Fatah; 2019, *Business Innovation & Entrepreneurship Journal (BIEJ)*, Vol. 1, No. 1, pp. 11-20